

BAB II

KONFLIK SURIAH DAN PERAN *MULTIFACETED*

TIONGKOK

Setelah membangun kerangka berfikir pada bab sebelumnya melalui penjelasan pada latar belakang dan landasan teori, bab ini akan membahas mengenai peran Tiongkok dalam konflik Suriah dengan menggunakan diplomasi *quasi mediation*. Pada bagian pertama akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana situasi sebelum dan setelah konflik di Suriah terjadi. Kemudian bagian kedua akan mengelaborasi level *multifaceted intervention* di dalam diplomasi *quasi meditaion* yang digunakan Tiongkok dalam konflik Suriah. Kondisi kehidupan masyarakat Suriah sebelum terjadinya fenomena *Arab Spring* telah mengakibatkan luka mendalam bagi beberapa sekte di Suriah. Diketahui rasa kebencian tersebut menjadi pendorong utama keberanian masyarakat untuk melakukan perlawanan pada 2010. Konflik semakin rumit paska aktor-aktor lain muncul dalam penyelesaian konflik. Karena semua aktor memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam penyelesaian konflik di Suriah. Selain itu kekuatan internasional yang masuk kedalam medan konflik juga membawa kepentingan yang berbeda. Hadirnya dua kekuatan besar dunia yaitu Rusia dan AS dalam konflik tersebut telah menarik perhatian penulis untuk melihat keterlibatan Tiongkok di tengah-tengah dua kekuatan besar dalam konflik tersebut. Pada bab selanjutnya akan menganalisis motif yang mendukung Tiongkok untuk menggunakan pendekatan pada level *multifaceted intervention* dari diplomasi *quasi mediation* di konflik Suriah. Hal ini akan menjadi penting untuk dibahas karena juga akan berguna untuk mengetahui

faktor-faktor baru yang mendorong Tiongkok melakukan pendekatan menggunakan diplomasi tersebut di konflik Suriah.

II.1 Konflik Suriah

Untuk memahami konflik di Suriah bermula, seorang pakar Suriah Josef Olmert mengatakan bahwa *“its fundamental causes, as well as its course and possible implications are uniquely bound with the political development of the Syrian state from its very inception”* (Olmert, 2012). Seperti hubungan kelompok Alawit dan Sunni, sebelum 1963 hubungan keduanya dijahit dengan kebencian dan penghinaan, karena pada saat itu status sosial ekonomi Alawit rendah, dimana sering terjadi penghinaan terhadap kelompok Alawit oleh kelompok Sunni. Namun hal tersebut berbanding terbalik sejak 1971, Hafez al-Assad menjadi Presiden Suriah yang merupakan anggota Partai Ba’ath dari aliran Alawit. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Alawit meningkat dan memegang kekuasaan di Suriah, mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan dan bekerja sebagai dokter, professor, pengacara dan insinyur (Dam, 1996). Akibat dari kekuasaan partai Baath, prinsip-prinsip demokrasi mulai hilang di Suriah, menjadikan keluarga Assad satu-satunya pusat kehidupan politik di Suriah karena mereka telah menguasai politik, militer, dan perekonomian (Goulden, 2011). Untuk mempertahankan kekuasaannya, pada 1973 Hafez mengeluarkan kebijakan mengenai pemilihan Presiden yaitu “seorang Presiden harus berasal dari orang Islam”, namun masyarakat menolak kebijakan tersebut yang berdampak menjadi kerusuhan di Suriah (Baltes, 2016). Hal-hal tersebut terus menyebabkan gesekan antara masyarakat dengan pemerintahan Suriah.

Setelah Hafez meninggal, Bashar al-Assad ditunjuk sebagai penerus kepemimpinan di Suriah. Masyarakat Suriah semakin menderita karena ketidakadilan penegakkan hukum, korupsi meningkat, dan ketimpangan ekonomi terus meningkat, yang juga menyebabkan kemiskinan meningkat di Suriah. Masyarakat tidak lagi mendapatkan hak-hak mereka seperti akses untuk kehidupan politik, ekonomi, dan akses Pendidikan. Bahkan kebanyakan dari mereka tinggal di perumahan yang kumuh, seperti diketahui dalam beberapa laporan 42% masyarakat tinggal dengan kondisi yang tidak layak sebelum konflik Suriah terjadi (Rivlin, 2011). Diperburuk dengan kebijakan pemerintah yang tidak bermartabat kepada masyarakat Suriah, dan hak-hak asasi manusia sangat dikesampingkan. Hal ini sekaligus menjadi mesin otomatis pemupuk kebencian terhadap rezim pemerintah. Kondisi ini membuat masyarakat tidak memiliki keharmonisan sejak awal dengan rezim pemerintah.

Kondisi tersebut yang kemudian mendorong kebencian masyarakat untuk melakukan revolusi bersama dalam fenomena *Arab Spring* terhadap rezim Bashar al-Assad (Goulden, 2011). Pada awalnya masyarakat melakukan aksi demonstrasi damai sebagai efek fenomena *Arab Spring*, menuntut pemerintah yang korup dan brutal dan meminta hak-hak ekonomi dan politik serta penindasan terhadap hak-hak kebebasan masyarakat. Menurut Heiko Wimmen seorang peneliti dalam *Crisis Group* di Irak, Suriah, Lebanon mengatakan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan di Suriah bukan karena sektarianisme di masyarakat, melainkan penyatuan keluhan politik dan sosial (Wimmen, *Syria's Path From Civic Uprising to Civil War*, 2016). Hingga pada 2010, Bashar al-Assad dengan ceroboh menyulut persetujuan yang membuat Suriah terbakar ketika ia memberi wewenang kepada

pasukan keamanan di kota Dara selatan yang sebagian besar merupakan warga Sunni, untuk menggunakan senjata dalam mengamankan para demonstran yang melakukan demonstrasi secara damai. Pada waktu yang sama dengan aksi demonstrasi damai tersebut anak-anak di kota Deraa menulis sebuah kalimat di dinding sekolah mereka yaitu “menuntut jatuhnya rezim”. Atas kritikan tersebut Bashar Al-Assad kemudian memerintahkan Jendral Atef Najeeb untuk menangkap anak-anak tersebut, dan mereka disiksa dengan dipukuli, disetrum listrik, dan kuku-kuku mereka ditarik keluar (Hasan, 2019).

Aksi penangkapan tersebut memperburuk situasi di kota Deraa yang menyebabkan keresahan pada 15 Maret 2011. Keresahan tersebut semakin tidak terkendalikan ketika pada 23 Maret di Masjid Deraa Al-Omari, para demonstran ditembaki oleh tentara Bashar al-Assad yang menyebabkan 5 orang tewas pada hari itu. Tidak berhenti sampai disitu aksi kekerasan oleh militer Suriah terus meluas hingga pelayat di kota Douma juga ditembaki ketika hendak melayat korban demonstran yang meninggal sebelumnya. Memperparah kondisi Suriah pada 25 Maret, aksi tersebut telah menyebar keseluruh kota di Suriah, Daraa, Damaskus, Homs dan Banias (Albasoos, 2017). Hal itu berakibat pada eskalasi konflik di Suriah semakin besar, membuat berbagai kelompok-kelompok masyarakat bergabung untuk melawan pemerintah Suriah. Situasi tersebut tidak hanya melibatkan kelompok pemerintah dan oposisi melainkan juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain yang muncul untuk memperebutkan kekuasaan atas kondisi Suriah yang sedang tidak stabil. Seperti, Hizbullah, *Islamic state of Iraq and Syria* (ISIS), *kurdish people's protection units* (YPG), dan *free syrian army* (FSA), dimana kelompok-kelompok tersebut sebagian besar didukung oleh negara-

negara kekuatan besar dalam pasokan senjata. Hal tersebut membuat upaya solusi penyelesaian konflik semakin rumit dan menyebabkan konflik multilateral menjadi semakin kompleks.

Disinyalir intervensi kemanusiaan masyarakat internasional berasal dari data-data yang tersedia di sosial media internet. Kebebasan internet di Suriah telah memobilisasi kondisi politik jalanan yang mendukung kelompok oposisi untuk bersatu. Namun hal tersebut tidak seburuk dari dampak media sosial yang terjadi di Mesir. Karena jumlah pengguna internet di Suriah tidak lebih dari 20%, sementara itu di Mesir internet digunakan untuk memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan waktu dan taktik demonstrasi. Berbeda halnya dengan Suriah, yang hanya menggunakan internet sebagai alat untuk menentukan pelaksanaan shalat Jum'at dan pemakaman jenazah korban pembunuhan oleh pasukan militer Bashar al-Assad, serta menyiarkan apa yang terjadi di Suriah saat itu. Internet telah menjadi pusat informasi mengenai kondisi Suriah saat itu, menceritakan pelanggaran-pelanggaran HAM di Suriah secara nyata. Membuat pandangan internasional terhadap konflik Suriah sebagai kerusuhan yang mematikan, hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong negara-negara untuk melakukan intervensi langsung atas konflik Suriah (Tkacheva, et al., 2013).

Pada 4 oktober 2011 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi konflik Suriah (Council, 2011). Resolusi tersebut pertama kali dirancang oleh Perancis untuk menghentikan pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Pemerintah Suriah. Resolusi tersebut diputuskan setelah lebih dari 2.000 orang tewas dalam beberapa bulan semenjak konflik tersebut dimulai pada Maret 2010. Namun tidak semua anggota PBB setuju dengan cara tersebut, Rusia dan Tiongkok

menggunakan hak vetonya untuk menghentikan upaya tersebut (Harris, 2012). Hal tersebut dilakukan karena, Rusia sangat menentang dominasi AS di Timur Tengah, mengingat belajar pada peran AS dalam konflik di Libya. Menurut Rusia penyelesaian konflik harus dilakukan oleh kedua kelompok melalui jalan damai tanpa melibatkan pihak lain (Mohammed & Al-Khalidi, 2013). Upaya lain telah dilakukan oleh AS, diantaranya adalah tuntutan oleh AS, Presiden Barack Obama menuntut agar Presiden Bashar al-Assad untuk segera turun dari jabatannya atas akibat dari perbuatannya, namun Presiden Bashar al-Assad tetap percaya diri dengan adanya dukungan yang diberikan Rusia (Gamboa, 2013). Rusia telah mengirimkan rudal anti-kapal selam, rudal S-300, amunisi lainnya pada 2013 untuk mencegah masuknya barat dari zona larangan terbang. Dalam rangka menyeimbangkan konflik di kawasan tersebut, AS kemudian mempersenjatai kelompok-kelompok oposisi namun upaya ini tidak bertahan lama (Gamboa, 2013). Rusia menggunakan hak vetonya bukan semata-mata karena keterikatan ekonomi ataupun militer. Melainkan langkah tersebut diambil untuk melindungi Suriah melawan kelompok islam radikal (teroris). Karena Suriah merupakan benteng pertahanan melawan kelompok teroris bagi Rusia. Hal tersebut juga membawa keuntungan bagi Rusia, dimana Suriah menjadi zona militer Rusia, kedua kebijakan Suriah menjadi lebih dekat dengan langkah-langkah yang diambil Rusia. Disamping itu peran AS terlihat membingungkan dalam menentukan posisinya di konflik Suriah. Setelah terpilihnya Presiden Donald Trump dalam pemilu AS, sikap AS di dalam konflik Suriah semakin agresif. Pada tahun pertamanya Trump mengambil sikap untuk melawan kelompok ISIS dalam konflik tersebut, namun secara bersamaan Trump berjanji untuk menarik diri dari konflik Suriah.

Upaya untuk membantu penyelesaian konflik Suriah tidak hanya melibatkan negara-negara kekuatan besar, namun juga negara-negara Teluk, Iran, Turki, dan Israel (Borger, 2018). Konflik tersebut telah menyebabkan kekacauan kawasan di Timur Tengah dan mengancam kepentingan Tiongkok di kawasan tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan Tiongkok untuk memastikan kestabilan di Suriah untuk mencapai kepentingan ekonominya adalah dengan juga terlibat langsung di dalam konflik tersebut. Keterlibatan Tiongkok di kawasan MENA telah dijelaskan secara umum oleh Sun dan Zoubir menggunakan empat pendekatan diplomasi, yaitu; *multifaceted intervention*, *proactive involvement*, *limited intercession*, dan *indirect participation*. Namun Sun dan Zoubir belum secara spesifik menjelaskan peran Tiongkok di konflik Suriah berada di pendekatan yang mana. Sehingga bagian selanjutnya akan menjelaskan posisi diplomasi yang dipilih Tiongkok dari keempat pendekatan tersebut.

II.2 Kebijakan Tiongkok Dalam Konflik Suriah: *Multifaceted Intervention*

Jika dilihat dari teori *quasi mediation* keterlibatan Tiongkok di konflik Suriah dapat dikategorikan sebagai *multifaceted intervention*. Dalam melakukan diplomasi *multifaceted intervention* dalam artikel yang ditulis oleh Sun dan Zoubir, diplomasi Tiongkok di dalam konflik MENA memiliki beberapa karakteristik yaitu pertama; mengirimkan utusan diplomatik khusus, kedua; pemerintah Tiongkok mendorong kepada pihak yang bertikai untuk merancang proses negosiasi agar mencapai kesepakatan dalam waktu singkat, dan ketiga; memberi bantuan khusus seperti bantuan ekonomi, bantuan kemanusiaan dan bantuan militer agar keduanya mencapai kesepakatan dalam waktu yang singkat. Penjelasan dibawah ini

selanjutnya akan membuktikan beberapa karakteristik yang sama seperti yang dilakukan Tiongkok di MENA di dalam diplomasi Tiongkok di konflik Suriah.

Hubungan antara Tiongkok dan Suriah sebelum terjadinya konflik Suriah dapat dikatakan tidak memiliki hubungan diplomatik yang khusus antara keduanya. Hubungan keduanya kebanyakan dihiiasi akan adanya kepentingan perdagangan. Selain itu tahun-tahun sebelum terjadinya konflik pada 2010 Tiongkok tidak begitu tertarik dalam menjalin hubungan dengan Suriah. Namun hubungan keduanya kian meningkat pasca perang tersebut terjadi, bersamaan pergantian rezim Tiongkok oleh Xi Jinping. Dalam wawancara khusus yang dilakukan oleh *China Phoenix Television* di Damaskus, Bashar al-Assad menyebutkan bahwa “*his regime's ties with China are strengthening as the situation within Syria and the geopolitics surrounding it shift*” (Taylor, 2017). Sehingga secara bersamaan dapat diartikan hubungan keduanya kian meningkat ketika pergantian rezim Tiongkok dan konflik Suriah terjadi. Tiongkok, telah sejak awal melibatkan diri ke dalam konflik Suriah, konflik yang dimulai pada awal 2010 telah meresahkan masyarakat internasional dan juga Tiongkok. Namun keterlibatan Tiongkok yang merupakan karakteristik dari diplomasi *multifaceted intervention* ditandai pada Desember 2015.

Kekacauan yang disebabkan konflik Suriah tidak mampu diselesaikan oleh Dewan Keamanan PBB, perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang berupaya menyelesaikan konflik telah mengakibatkan penyelesaian konflik semakin berlarut-larut. Pada 2014 kelompok militan bersenjata ISIS telah menguasai salah satu wilayah di Suriah, dimana ada laporan internasional yang menyatakan bahwa orang-orang Uighur terlibat dalam kelompok ISIS melawan pemerintah Suriah (Erdogan, 2014). Kondisi Suriah semakin diperparah setelah Rusia meluncurkan

serangan pertama kedelapan wilayah Suriah pada Oktober 2015, serangan tersebut diakui Rusia untuk menargetkan kelompok militan ISIS, namun AS membantah klaim tersebut, dimana Rusia telah menyerang masyarakat sipil Suriah yang berada dipihak oposisi (Yuhas, Borger, Ackerman, & Shaun Walker, 2015). Ketidakstabilan dan keterlibatan warga negara Tiongkok dalam konflik tersebut membuat Tiongkok mengambil langkah lebih awal untuk memastikan kedua belah pihak untuk bersedia terlibat dalam resolusi perdamaian PBB 2254, pada 18 Desember 2015 dimana PBB mendorong kedua belah pihak untuk menggelar perundingan pada awal Januari 2016. Di dalam resolusi tersebut bertujuan untuk mengusulkan peta jalan bagi proses perdamaian di Suriah, yang menetapkan garis besar untuk pembicaraan yang didukung oleh PBB.

II.2.1 Tiongkok Sebagai Aktor Netral Dalam Konflik Suriah

Tiongkok memiliki beberapa pandangan dan kepentingan yang sama dalam keterlibatan di konflik Suriah dengan Rusia. Keduanya memberikan hak vetonya untuk melindungi Suriah dan memastikan secara langsung kondisi stabilitas di Suriah, yaitu salah satunya karena adanya kepentingan untuk menjaga kawasan tersebut dari gerakan islam radikal (teroris) seperti ISIS dan Al-Qaeda. Dalam beberapa permasalahan yang terjadi di Tiongkok disebutkan bahwa bagaimana perkembangan kelompok islam radikal telah membawa dampak di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. Bersamaan dengan hal tersebut letak geografis Suriah berdekatan dengan Rusia, hal ini kemudian yang menjadi perhatian penting bagi Rusia bagaimana perkembangan kelompok islam radikal juga membawa dampak ancaman kamana terhadap

negaranya. Meskipun demikian peran yang diberikan keduanya berbeda dalam konteks konflik Suriah, dimana Rusia memainkan peran aktif dengan terlibat langsung di dalam intervensi militer ke Rusia. Sementara itu Tiongkok lebih cenderung berhati-hati dan tidak melakukan intervensi militer di dalam konflik Suriah untuk mencapai kepentingannya, karena alasan aktor-aktor yang terlibat.

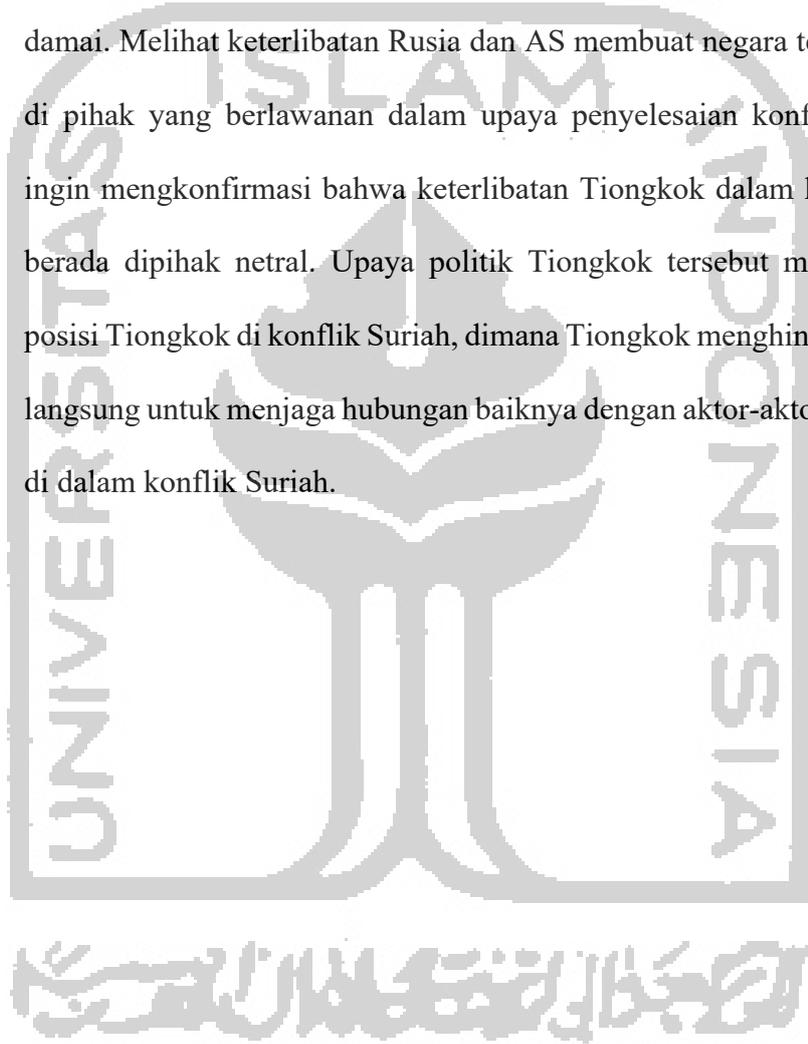
Penanganan konflik di Suriah oleh Tiongkok berbeda dengan aktor-aktor yang lain, Tiongkok dikenal sebagai negara yang selalu memegang prinsip non-intervensi. Prinsip ini telah menjadi pedoman dalam arah kebijakan luar negeri Tiongkok, telah lebih dari 60 tahun Tiongkok memegang prinsip tersebut, tepatnya sejak diresmikannya perjanjian *Panchsheel* sejak diresmikannya perjanjian *Panchsheel* atau '*Five Principle of Peaceful Coexistence*' (Ministry of External Affairs Government of India, 2004). Sikap non-intervensionis Tiongkok di konflik Suriah telah membantu Tiongkok dalam memperluas kekuatan *soft power* di Timur Tengah. Selain memveto beberapa resolusi yang telah dikeluarkan dewan keamanan PBB, Tiongkok juga aktif dalam mengirimkan utusan diplomatiknya untuk melakukan upaya penyelesaian konflik melalui jalur politik. Upaya diplomatik pertama yang dilakukan Tiongkok adalah pada 13 Maret 2012 Asisten Menteri Luar Negeri Tiongkok yang juga merupakan utusan khusus Tiongkok, Zhang Ming, melakukan pembicaraan ke Kairo, bertemu dengan ketua Liga Arab, Nabil al-Arabi. Zhang Ming membahas mengenai permasalahan konflik Suriah dan juga regional lainnya. Zhang menyampaikan dalam kunjungannya tersebut bahwa "Tiongkok dan Liga

Arab memiliki konsensus yang luas pada krisis Suriah”. Ia berharap Tiongkok dan Liga Arab dapat melakukan upaya lebih lanjut terkait permasalahan di konflik Suriah. Dalam memperkuat komunikasi dan negosiasi penyelesaian konflik tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Liu Wei Min menyampaikan enam butir pernyataan yaitu (Mardiani, 2012):

- Menghentikan semua tindak kekerasan
- Meluncurkan dialog politik inklusif
- Mendukung upaya bantuan kemanusiaan
- Menghormati kedaulatan Suriah
- Menyambut penunjukan utusan khusus bersama oleh PBB dan Liga Arab
- Memastikan semua anggota Dewan Keamanan PBB mematuhi prinsip dan tujuan Piagam PBB.

Pada tahun yang sama selain mengunjungi Ketua Liga Arab, Zhang juga mengunjungi Mesir yang juga terdampak kekacauan akibat *Arab Spring*. Setelah mengunjungi Ketua Liga Arab, Zhang melanjutkan perjalanannya ke Perancis untuk melakukan lobi lebih lanjut dengan Paris terkait permasalahan konflik di Suriah. Masih pada tahun yang sama, Dr. Tim Summers menulis di halaman media bahwa Tiongkok juga aktif dalam melakukan perundingan bertemu dengan pihak pemerintah dan kelompok oposisi untuk menemukan jalan keluar mengakhiri konflik di Suriah. Dalam pertemuan tersebut Tiongkok menjadi tuan rumah bagi kedua kelompok. Tiongkok berupaya untuk konsisten tidak memihak kelompok manapun, hal

itu bertujuan untuk menjaga kepercayaan setiap kelompok yang berseteru. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Tiongkok ingin memperlihatkan posisinya kepada kedua kelompok bahwa ia tidak berada dipihak manapun (Summers, 2013). Hal ini dilakukan Tiongkok untuk memastikan upaya penyelesaian permasalahan di Suriah dapat dilakukan dengan cara yang damai. Melihat keterlibatan Rusia dan AS membuat negara tersebut berada di pihak yang berlawanan dalam upaya penyelesaian konflik, Tiongkok ingin mengkonfirmasi bahwa keterlibatan Tiongkok dalam konflik Suriah berada dipihak netral. Upaya politik Tiongkok tersebut memperlihatkan posisi Tiongkok di konflik Suriah, dimana Tiongkok menghindari intervensi langsung untuk menjaga hubungannya dengan aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik Suriah.



II.2.2 Tiongkok Menjadi Tuan Rumah Dalam Upaya Dialog Damai

Desember 2015 Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mendesak kelompok-kelompok oposisi dan pemerintah Suriah untuk ikut terlibat dalam dialog damai dan negosiasi tanpa syarat yang akan dilaksanakan pada Januari 2016 di Jenewa. Wang bertemu dengan Alptekin Hocaoglu di Beijing, Alptekin Hocaoglu atau juga dikenal dengan nama Khaled Khoja merupakan ketua koalisi dari pihak oposisi *National Coalition for Syrian Revolution and Opposition Forces* (NCSROF). Tiongkok memilih untuk mengundang NCSROF ke Beijing adalah karena kelompok oposisi ini mewakili seluruh masyarakat Suriah, dan telah dilegitimasi oleh banyak negara dunia, seperti beberapa diantaranya adalah AS dan Uni Eropa (UE). Dimana Tiongkok melihat bahwa kelompok ini merupakan representasi yang sebenarnya dari masyarakat Suriah.

Pada pertemuan tersebut Wang mendesak pimpinan koalisi oposisi untuk mendukung upaya perdamaian oleh PBB dan ikut serta dalam pembicaraan damai yang akan dilaksanakan pada Januari 2016 bersama pihak pemerintah Suriah (Xiaokun, 2016). Beberapa hari sebelum pertemuan Wang dengan ketua koalisi oposisi Suriah, Wang telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem pada 23 Desember. Wang juga mengajak hal yang sama kepada al-Moallem untuk ikut serta dalam pembicaraan damai yang akan diselenggarakan oleh Dewan Keamanan PBB pada Januari 2016. Dialog tersebut disambut positif oleh perwakilan al-Moallem, ia mengatakan *"Our delegation will be ready as*

soon as we receive a list of the opposition delegation” (Syria ready to take part in Geneva peace talks: Minister, 2015).

Bersama dengan upaya diplomatik tersebut, Tiongkok juga menjanjikan penambahan 40 juta Yuan untuk bantuan kemanusiaan ke Suriah agar kedua kelompok mau ikut serta dalam perundingan tersebut (Qingyun, 2016). Desakan ini dilakukan Tiongkok setelah memprediksi serangan yang sebelumnya dilakukan Rusia diperkirakan akan berdampak pada serangan balasan dari pihak oposisi dan mengakibatkan solusi damai akan sulit didapatkan. Upaya meredam gencatan senjata adalah jalan terbaik untuk menghindari perang selanjutnya bagi Tiongkok. Hasil kunjungan kedua belah pihak ke Beijing saat itu antara lain adalah menyetujui untuk mengikuti dialog damai yang akan dilakukan pada sidang Dewan Keamanan PBB pada Januari 2016. Adapun isi dari resolusi Dewan Keamanan PBB yang didukung oleh Tiongkok pada 18 Januari di New York tersebut adalah sebagai berikut (Resolution 2254 , 2015):

- Menyerukan gencatan senjata dan perundingan formal mengenai transisi politik yang dimulai pada awal Januari.
- Kelompok yang dipandang sebagai ‘teroris’, termasuk ISIS dan Front Al-Nusra, dipinggirkan.
- ‘Aksi defensif dan ofensif’ terhadap kelompok-kelompok ini mengacu pada serangan udara koalisi pimpinan AS dan Rusia akan berlanjut.
- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon akan melapor pada 18 Januari mengenai cara memantau gencatan senjata.

- ‘Tata pemerintahan yang kredibel, inklusif, dan non-sektarian’ akan dibentuk dalam kurun enam bulan.
- ‘Pemilihan umum yang adil dan bebas’ di bawah pemantauan PBB akan diselenggarakan dalam 18 bulan.
- Transisi politik harus dipimpin Suriah

Resolusi tersebut disetujui oleh 5 anggota permanen dan 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Namun upaya negosiasi perdamaian tersebut gagal setelah pihak oposisi pada Februari 2016 menuduh Suriah dan Rusia telah membunuh kurang lebih 300 orang setelah kesepakatan pada bulan sebelumnya telah dilakukan oleh kedua pihak (Tempo, 2016).

Bila dibandingkan dengan AS dan Rusia, Tiongkok memiliki keuntungan untuk lebih leluasa dalam melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Hal itu disebabkan oleh sikap Tiongkok yang sejak awal telah mendeklarasikan dirinya bahwa ia tidak mendukung upaya intervensi dalam bentuk apapun dan menyatakan diri sebagai pihak yang netral. Meskipun demikian, sikap Tiongkok dalam menangani konflik mengalami perubahan bila dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, dimana para pemimpin sebelumnya selalu menjunjung tinggi prinsip kedaulatan suci yaitu menolak intervensi langsung dan penyelesaian masalah tersebut diserahkan penuh kepada internal negara yang bersangkutan. Dalam mengamati pola indikator sikap Tiongkok tersebut Michael D. Swaine melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir sikap tradisional Tiongkok dalam urusan intervensi asing mengalami beberapa

perubahan yang cukup signifikan (Swaine, 2012). Perubahan tersebut dapat dilihat dari tindakan Tiongkok cenderung berpartisipasi aktif dalam isu-isu internasional di sepanjang jalur BRI, namun dengan langkah yang berhati-hati

II.2.3 Utusan Khusus Tiongkok ke Suriah

Setelah melakukan upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik melalui dialog damai dalam pertemuan sidang Dewan Keamanan PBB pada Januari 2016, Tiongkok terus aktif untuk mempercepat rekonsiliasi keduanya. Pada 16 Agustus 2016 Tiongkok untuk pertama kalinya mengirimkan utusan diplomatiknya ke wilayah konflik Suriah, di Damaskus. Direktur Kantor Kerjasama Militer Internasional Komisi Militer Pusat Tiongkok, Guan Youfei terbang ke Damaskus pada Selasa Agustus bertemu Menteri Pertahanan Suriah Fahad Jassim al-Frei. Dalam tujuan politisnya tersebut Guan menyampaikan secara konsisten Tiongkok mendorong pencapaian resolusi konflik di Suriah. Dikutip dari *Xinhuan* Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas untuk meningkatkan pelatihan militer dan bantuan kemanusiaan ke Suriah. Dimana keduanya mencapai kesepakatan untuk pelatihan personel tentara Suria untuk melatih para tentara Suriah yang baru saja membeli senjata dari Tiongkok dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada tentara Suriah (Xinhua, 2016).

Tabel 2.1 Upaya Diplomasi Multifaceted Tiongkok Di Konflik Suriah

<p>Pernyataan Posisi Netral Tiongkok Dalam Keterlibatan Di Konflik Suriah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 13 Maret 2012 Asisten Menteri Luar Negeri Tiongkok Zhang Ming bertemu dengan ketua Liga Arab, Nabil al-Arabi untuk membahas mengenai permasalahan konflik Suriah dan juga regional lainnya. • Pada tahun yang sama Zhang juga mengunjungi pihak pemerintah dan pihak oposisi untuk memperlihatkan posisi netral.
<p>Tiongkok Menjadi Tuan Rumah Dalam Upaya Dialog Damai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desember 2015 Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mendesak kelompok-kelompok oposisi dan pemerintah Suriah untuk ikut terlibat dalam dialog damai dan negosiasi tanpa syarat yang akan dilaksanakan pada Januari 2016 di Jenewa.
<p>Utusan Khusus Tiongkok ke Suriah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada 16 Agustus 2016 Tiongkok Guan Youfei terbang ke Damaskus untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Suriah Fahad Jassim al-Frei.